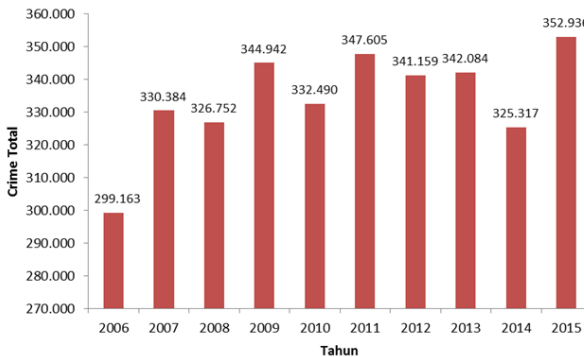


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan di suatu daerah memerlukan analisis spasial agar masyarakat dapat mengetahui lokasi yang rawan kejahatan. Data kejadian tindak kejahatan (TKP) biasanya hanya tersaji dalam bentuk tabel, padahal data tersebut dapat direpresentasikan secara spasial dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis (SIG) menjadi peta baik secara analog maupun berbasis *web*. Upaya mengkaji kejahatan secara spasial juga berguna dalam menentukan pola kejadian tindak kejahatan berdasarkan kondisi lingkungan sekaligus strategi pencegahannya.

Kejahatan merupakan fenomena geografis yang bersifat destruktif karena menimbulkan berbagai kerugian bagi manusia baik secara fisik, materiil, maupun imateriil (Gosita, 2015, hlm. 44). Layaknya negara berkembang lainnya, kejadian kejahatan (*crime total*) di Indonesia senantiasa meningkat sebanyak 1,98 persen setiap tahunnya dari tahun 2006 hingga 2015, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 *Crime Total* di Indonesia tahun 2006 s.d. 2015
(Sumber: Subdirpolkam, 2016)

Crime total di Indonesia mengalami fluktuasi dengan tren perkembangan yang senantiasa meningkat. Rentang 10 tahun terakhir, jumlah kejahatan meningkat sebanyak 17,97 persen atau 53.773 kasus. Kondisi demikian selaras pula dengan tingkat kerentanan masyarakat Indonesia terhadap kejahatan (*crime rate*) mencapai 140, hal ini berarti

Moh Dede, 2018

PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

terdapat potensi 140 kasus kejahatan tiap 100.000 jiwa penduduk. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara yang memiliki *crime total* dan *crime rate* tertinggi di Asia Tenggara dengan aglomerasinya berada di kawasan perkotaan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung (Rentjoko, 2015a; Rentjoko, 2015b; Erizal, 2017, hlm. 2).

Kota Bandung tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Jawa Barat. Selama tahun 2014 terdapat 4889 kasus Kejahatan, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 4.135 kasus kejahatan (Satreskrim Polrestabes Bandung, 2016, hlm. 3). Bila dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang ditangani oleh Polda Jawa Barat, Kota Bandung berkontribusi atas 16 hingga 20 persen *crime total* Jawa Barat (lihat **Tabel 1.1**).

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Jumlah Kejahatan di Kota Bandung dan Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

| Tahun | Kejahatan | | Presentase (%) |
|-------|------------|--------------|----------------|
| | Jawa Barat | Kota Bandung | |
| 2011 | 29.296 | 5.307 | 18,12 |
| 2012 | 27.247 | 5.378 | 19,74 |
| 2013 | 24.843 | 4.226 | 17,01 |
| 2014 | 25.772 | 4.889 | 18,97 |
| 2015 | 25.702 | 4.135 | 16,09 |

Sumber: Satreskrim Polrestabes Bandung, 2016; Kompas.com, 2017

Bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan lainnya di Jawa Barat, *crime rate* Kota Bandung pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi ke tiga setelah Kota Sukabumi dan Kota Cirebon dengan nilai 144,22. Angka ini lebih besar dari rata-rata nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai 131 dan 71 (Subdirstatpolkam, 2015, hlm. 17-19). Kondisi ini terkesan ironi, karena wilayah ini memiliki 29 pos kepolisian atau terbanyak di Jawa Barat (Satreskrim Polrestabes Bandung, 2016, hlm. 3; BPS Kota Bandung, 2015, hlm. 130).

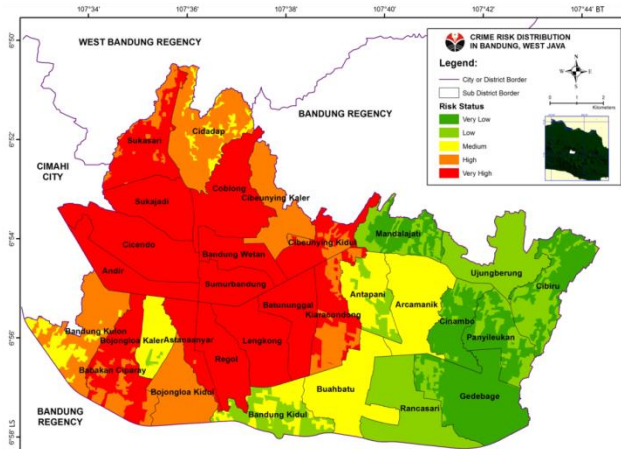
Sebagai daerah metropolitan yang menjadi area pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya, Kota Bandung terindikasi memiliki berbagai *crime generator* dan *crime attractor*, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, kesejahteraan penduduk, banyaknya fasilitas publik, perputaran ekonomi yang masif, dan pola interaksi masyarakat kota yang cenderung individualis turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melancarkan berbagai aksi kejahatan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa Kota Bandung

Moh Dede, 2018

PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

memiliki tingkat kerawanan kejahatan mencapai 65 persen dengan aglomerasi kejahatan berada di wilayah barat dan pusat kota (Dede, Setiawan, dan Mulyadi, 2017), seperti yang tersaji pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2 *Peta Kerawanan Kejahatan Level Kecamatan di Kota Bandung* (Sumber: Dede, Setiawan, dan Mulyadi, 2017)

Di Kota Bandung, salah satu wilayah yang memiliki kerawanan kejahatan tertinggi adalah Kecamatan Sumur Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satreskrim Polrestabes Bandung (2017) dan BPS Kota Bandung (2017), Sumur Bandung memiliki *crime total* mencapai 341 dan *crime rate* mencapai 190,77. *Crime rate* wilayah ini lebih tinggi dari pada Kota Bandung yang mencapai 152,29 maupun kecamatan lainnya (lihat **Tabel 1.2**). Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung (2018) juga mengungkapkan salah satu permasalahan terbesar adalah tingginya intensitas tindak kejahatan, meskipun wilayah ini dikenal sebagai kawasan militer dan kepolisian.

Tabel 1.2 *Kecamatan di Kota Bandung dengan Kerawanan Kejahatan Tertinggi*

| Kecamatan | <i>Crime Total</i> | Σ Penduduk (jiwa) | <i>Crime Rate</i> |
|------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| Sumurbandung | 341 | 35.572 | 190,77 |
| Lengkong | 277 | 71.333 | 77,66 |
| Coblong | 266 | 131.435 | 40,47 |
| Regol | 265 | 81.635 | 64,92 |
| Sukajadi | 216 | 108.045 | 39,98 |

| | | | |
|-----------------|-----|---------|--------|
| Bandung Wetan | 205 | 30.805 | 133,09 |
| Batununggal | 204 | 120.555 | 33,84 |
| Andir | 201 | 97.278 | 41,32 |
| Bojongloa Kidul | 183 | 85.992 | 42,56 |
| Cicendo | 177 | 99.468 | 35,59 |

Sumber: Satreskrim Polrestabes Bandung dan BPS Kota Bandung. 2017

Guna menanggulangi kejahatan di kawasan perkotaan diperlukanlah kajian mengenai potensi kejahatan yang berorientasi pada aspek keruangan, temporal, dan lingkungan, kajian ini dikenal sebagai *geography of crime* (Knox dan Pinch, 2010, hlm. 221; Ceccato dan Law, 2014). Geografi memandang kejahatan sebagai fenomena spasial yang terikat dengan kondisi lingkungan seperti kepadudukan, sosio-ekonomi, penggunaan lahan, morfologi perkotaan, intervensi sosial dan lain sebagainya (Matthews, 2013, hlm. 13-21; Heath, 2015, hlm. 8).

Penelitian mengenai kondisi lingkungan dan kejahatan pada umumnya mengkaji lingkungan sebagai salah satu faktor pendorong / penarik kriminal. Santana dkk. (2008), distribusi spasial kejahatan di Kota Lisbon, Portugal umumnya berada pada lokasi yang memiliki kerentanan ekonomi dan sulit dijangkau oleh patroli keamanan. Hubungan antara kejahatan dan kondisi lingkungan juga pernah dikaji oleh Drianda, dkk. (2015) yang membuktikan bahwa intervensi (kontrol) terhadap lingkungan oleh pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat Jepang mampu mengurangi risiko kejahatan. Sementara itu, Salehi (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat dan fitur geografis mempengaruhi tingkat kejahatan di kawasan perkotaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh antara kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial dengan kerawanan kejahatan pada kawasan perkotaan yang terfokus di Kecamatan Sumur Bandung. Upaya mengkaji fenomena tersebut penulis persembahkan dalam wujud karya tulis ilmiah dengan judul **“Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Kerawanan Kejahatan di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung)”**.

Moh Dede, 2018

PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

B. Rumusan Masalah

Keamanan terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan di Kota Bandung. Tingginya *crime rate* dan *crime total* di Kecamatan Sumur Bandung salah satunya disebabkan oleh kondisi lingkungannya baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Wilayah ini memiliki indeks perlindungan masyarakat dibawah rata-rata Kota Bandung yakni sebesar 41,7 persen (Satpol PP Kota Bandung, 2015, hlm. 29). Oleh sebab itu, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Apakah kondisi lingkungan berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?”.

Selain rumusan masalah utama tersebut, terdapat beberapa pertanyaan khusus yang akan dibahas sebagai masalah dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut diantaranya:

1. Apakah batas antar ruang privat berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?
4. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?
5. Apakah iklim sosial berpengaruh terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh kondisi lingkungan terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung. Sedangkan secara khusus terdapat sejumlah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Menganalisis pengaruh batas antar ruang terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung.
2. Menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung.
4. Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung.

Moh Dede, 2018

**PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

5. Menganalisis pengaruh iklim sosial terhadap kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua urgensi baik secara teoretis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan keilmuan geografi, khususnya geografi kejahatan sebagai sub-cabang geografi manusia yang mengkaji berbagai permasalahan spasial kejahatan dengan harapan mampu memberikan kontribusi untuk pencegahan kejahatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan ketajaman analisis geografi dalam mengkaji berbagai fenomena spasial-temporal kejahatan, sekaligus sebagai cara mengamalkan ilmu.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun inspirasi bagi peneliti lain dalam mengkaji berbagai fenomena kejahatan secara spasial yang berorientasi pada kondisi lingkungan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai koordinator dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman dan nyaman.

d. Bagi Aparat Keamanan

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi aparat keamanan dalam mengembangkan berbagai upaya preventif dalam mencegah kejahatan secara efektif dan efisien dengan pertimbangan segala aspek spasial dan lingkungan sekitar.

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kerawanan kejahatan di Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Sumur Bandung dalam rangka menumbuhkan kesadaran dalam menanggulangi kejahatan di lingkungan sekitarnya.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Bab I merupakan pendahuluan, bagian pertama berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi penelitian dan *state of art*. Kedua ialah rumusan masalah yang menjelaskan indentifikasi masalah dan penentuan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Ketiga berupa tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan pembahasan masalah dalam penelitian. Keempat adalah manfaat penelitian yang berisi manfaat teoretis untuk pengembangan keilmuan geografi dan manfaat praktis bagi penulis, masyarakat, peneliti, hingga pemerintah dan aparat keamanan. Kelima merupakan struktur organisasi skripsi yang menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi. Keenam definisi operasional yang berisi batasan konsep dan variabel penelitian yang disertai cara mengukur atau mengidentifikasi variabel tersebut. Ketujuh merupakan penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian penulis.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi berbagai teori dan konsep yang relevan dalam pembahasan masalah penelitian. Adapun berbagai teori dan konsep tersebut seperti definisi Geografi kejahatan, kerawanan kejahatan (konsep kejahatan, penggolongan kejahatan, faktor-faktor penyebab kejahatan, dan kerawanan kejahatan), lingkungan dan kejahatan (konsep lingkungan serta kondisi lingkungan dan kejahatan), hingga sistem informasi geografis.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas desain penelitian (lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian dan pendekatan geografi, serta variabel penelitian), populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, pengolahan data, dan alur penelitian. Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian, pembahasan masalah, dan pengujian hipotesis penelitian. Sedangkan Bab V Penutup berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian.

Moh Dede, 2018

**PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu konsep mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan berbagai karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2003, hlm. 74). Definisi operasional berguna untuk memberikan informasi tentang pengukuran variabel penelitian. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi merupakan situasi atau suasana yang sedang berlaku pada suatu objek, baik itu pada benda mati maupun makhluk hidup. (Kemendikbud RI, 2016; Anwar, 2003, hlm. 241). Sedangkan lingkungan merupakan semua kondisi, situasi, benda, dan makhluk hidup yang mempengaruhi perikehidupan, pertumbuhan, dan karakter suatu organisme (Neolaka, 2008, hlm. 25). Kondisi lingkungan terbagi atas kondisi lingkungan fisik dan sosial, lingkungan fisik yang dikenal sebagai ruang tempat berlangsungnya kehidupan, sedangkan lingkungan sosial merupakan manusia lainnya baik individu maupun kelompok yang mempengaruhi perkembangan, tingkah laku, dan pertumbuhan (Walgitto, 2010, hlm. 51; Barnett dan Casper, 2001, hlm. 465).

Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kerawanan kejahatan dikaji berdasarkan *Crime Prevention through Environmental Design* (CPTED) dan sosial-ekonomi di suatu wilayah (Taylor, 2005, hlm. 413-426; Santana, dkk., 2009, hlm. 7; Wortley dan Mazerolle, 2011, hlm. 160). Berbagai indikator CPTED dan sosial-ekonomi tersebut dianalisis mendalam, sehingga menghasilkan variabel kondisi lingkungan yang terdiri atas batas antar ruang privat, aksesibilitas, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan *social climate*. Kelima variabel tersebut akan dikaji dengan pendekatan kuantitatif guna mengetahui nilai keterpengaruhannya secara simultan maupun parsial terhadap kerawanan kejahatan di kawasan perkotaan. Luaran akhir dari analisis ini adalah hadirnya pemodelan spasial kerawanan kejahatan.

a. Batas Antar Ruang Privat

Batas antar ruang merupakan penegasan batas (teritorialitas) yang dilakukan oleh manusia terhadap teritorinya. Menurut Brantingham dan Brantingham (1981), batas antar ruang di kawasan perkotaan merupakan konsekuensi dari morfologi perkotaan, dimana wilayah tersebut mampu menarik para pelaku kejahatan. Penegasan batas antar ruang privat juga

Moh Dede, 2018

**PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

merujuk pada upaya defensif masyarakat melalui penciptaan *defensible space* guna meminimalisir terjadinya tindak kriminal (Maharika, 2009, hlm. 1).

Mappaturi (2012, hlm. 25) menjelaskan bahwa pagar sebagai representasi fisik dari batas antar ruang privat di suatu wilayah dapat diamati berdasarkan ketinggian, transparansi, bahan penyusunnya, dan rasio *gated-community*. Kegiatan observasi dan dokumentasi dilakukan untuk mengetahui penegasan batas antar ruang privat yang terdiri atas eksistensi, karakteristik, dan rasio *gated community*-nya. Batas antar ruang privat selanjutnya diklasifikasikan dengan teknik *natural breaks*, sehingga diperoleh rasio *gated community* tinggi, sedang, dan rendah pada seluruh RW di Kecamatan Sumur Bandung.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas dimaknai sebagai ketersediaan prasarana transportasi yang berguna bagi mobilitas dan arus interaksi manusia antar wilayah (Bintarto, 2015, hlm. 66). Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai adanya akses menuju ruang tertentu yang berimplikasi pada pergerakan, kehadiran, dan penggunaan ruang oleh manusia (Reis, dkk, 2003, hlm. 442). Dalam perspektif spasial kejahatan, tingginya aksesibilitas memberikan kemudahan memperoleh informasi, meminimalisir kecurigaan masyarakat, dan menyediakan opsi jalur pelarian beragam (Eck dan Weisburd, 2015, hlm. 11).

Secara spasial tingkat aksesibilitas dapat terukur dari nilai *turning (number of entries)*, indeks konektivitas (*graph network indices*), kemudahan akses (*access control*), dan kepadatan jalan (*road density*) (Sakip dan Salleh, 2018, hlm. 2; Nagne, dkk., 2013, hlm. 2292). Semua indikator diatas diperoleh berdasarkan data KemenPUPR dan pengamatan morfologi perkotaan berdasarkan citra satelit resolusi tinggi (CNES-Aribus) yang disadur via Google Earth diverifikasi dengan data HOT-BNPNB OSM Indonesia maupun observasi lapangan. Selain itu, pemerolehan data dan informasi mengenai regulasi akses dilengkapi dengan wawancara guna memperoleh informasi mengenai tingkat aksesibilitas di Kecamatan Sumur Bandung yang terdiri atas wilayah dengan nilai aksesibilitas tinggi, sedang, dan rendah.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan individu yang menempati suatu wilayah tertentu yang dinyatakan dalam satuan jiwa

Moh Dede, 2018

**PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

(Sembiring, 2007, hlm. 16). Jumlah penduduk yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kualitas hidup manusia. Selain menandakan keberlimpahan sumber daya manusia, jumlah penduduk yang melimpah di suatu juga mampu mendorong terjadinya tindak kejahatan (Steinmetz, 2016). Hassan dkk. (2016 hlm. 481) menerangkan, jumlah penduduk yang abnyak lebih menjanjikan *highly return* bagi pelaku kejahatan.

Menurut Truman dan Morgan (2018, hlm. 3-5), analisis kependudukan terhadap kejahatan dapat menggunakan data jumlah penduduk dan jumlah keluarga (*household*), karena kedua data tersebut merupakan acuan *crime rate* dan *victimization rate*. Jumlah penduduk dan keluarga diperoleh berdasarkan data kependudukan yang terdapat pada laporan tahunan BPS dan monografi (profil) kelurahan. Sedangkan *crime rate* dan *victimization rate* diperoleh dengan mengitung rasio antara jumlah penduduk maupun kelurga dengan tindak kejahatan di wilayah tertentu tiap 1000. Pemerolehan data dilakukan dengan studi dokumentasi, sedangkan upaya pengklasifikasiannya dilakukan dengan *natural break* atas wilayah berpenduduk banyak, sedang, dan sedikit.

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diartikan sebagai posisi individu maupun kelompok yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepemilikan sejumlah objek yang dianggap berharga di dalam suatu masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2014, hlm. 35), kondisi ekonomi secara umum dapat terbagi atas kedudukan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Mayoritas kejahatan menempatkan kondisi ekonomi sebagai faktor pendorong (Koinis dan Yarewood, 2009, hlm. 21). Kondisi ekonomi rendah menimbulkan kejahatan kekerasan dan pencurian sebagai bentuk legitimasi kebutuhan ekonominya (Roman, 2013; Finklea, 2011, hlm. 5).

Fajriawati (2016, hlm. 9) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat diamati dari tingkat pendapatan, tanggungan, dan kepemilikan sumber daya. Oleh sebab itu, upaya pengkajian kondisi ekonomi terhadap kejahatan dilakukan dengan mengukur indikator berupa tingkat pendapatan, besarnya pengeluaran, beban tanggungan, dan kepemilikan aset melalui kegiatan pengisian angket atau kuesioner. Akumulasi nilai dari setiap indikator tersebut ditentukan nilainya, sehingga menghasilkan data variabel ekonomi yang bersifat kontinu

Moh Dede, 2018

**PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

untuk tiap wilayah. *natural breaks* dipilih untuk mengetahui kondisi ekonomi untuk tiap wilayah, baik itu tinggi, sedang, maupun rendah.

e. **Iklim Sosial**

Iklim sosial sebagai kondisi hubungan antarindividu dalam suatu kelompok atau lingkungan sosialnya. Moos dan Holahan (2004, hlm. 787) menyatakan bahwa iklim sosial berada dalam suatu setting (lingkungan) sosial, seperti di tempat kerja, ruang kelas, *social group*, dan lingkungan sekitarnya. Dalam kajian kejahatan, iklim sosial mampu mencegah individu untuk melakukan tindak kejahatan, bila hubungan antar individu maupun dengan lembaga-lembaga sosial yang ada berlangsung baik (Hirschi, 2011, hlm. 188).

Iklim sosial dalam kajian kejahatan berfokus pada *fear of crime*, *sense of community*, dan pengendalian sosial kejahatan (Wortley Mazerolle, 2011, hlm. 151-160). Upaya pengumpulan data tersebut dilakukan menggunakan angket atau kuesioner yang diperkuat dengan data hasil wawancara. Iklim sosial teramati menggunakan skala Likert yang dikuantifikasikan. Data iklim sosial tiap RW diklasifikasikan berdasarkan teknik *natural breaks* yang terbagi atas *social climate* tinggi, sedang, dan rendah.

2. **Kerawanan Kejahatan**

Fahmi (2014, hlm. 97) menerangkan bahwa kerawanan kejahatan merupakan persebaran potensi terjadinya tindakan kejahatan yang akan menimpa seseorang atau kelompok pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Kerawanan kejahatan juga dapat diartikan sebagai kepadatan (intensitas) tindak kejahatan di suatu wilayah (Hilman dkk. (2015, hlm. 32). Upaya pengkajian kerawanan kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari analisis kejahatan itu sendiri, karena tingkat kerawanan dibentuk atau berbasis pada nilai kejahatan eksisting yang ada di suatu wilayah.

Kerawanan kejahatan secara spasial diketahui melalui *kernel density estimation* (KDE). Menurut Gerber (2014, hlm. 4), KDE mampu mengidentifikasi konsentrasi kejahatan (*crime hotspot*) secara spasial berdasarkan data kejahatan periode sebelumnya, karena fenomena kejahatan pada waktu yang akan datang cenderung terjadi di sekitar lokasi kejahatan sebelumnya. Kerawanan kejahatan di wilayah ini ditentukan berdasarkan data kejahatan eksisting dari kepolisian yang divalidasi melalui teknik geo-statistik dengan mengamati nilai *mean*

Moh Dede, 2018

PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

error, *root mean square error*, dan R^2 . Kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung diklasifikasikan berdasarkan *natural break jenk*, sehingga diperoleh wilayah dengan kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.

G. Penelitian Sebelumnya

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kebaruan penelitian ini mencakup metodologi dan substansi. Dari segi metodologi, penelitian memadukan metode statistik konvensional dan geo-statistik guna membangun pemodelan spasial kerawanan kejahatan di Kecamatan Sumur Bandung. Sedangkan dari segi substansi, penelitian ini diharapkan dapat menguatkan argumen terkait pengaruh kondisi lingkungan terhadap kejahatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam *crime prevention strategy* yang diselenggarakan baik oleh aparat keamanan, pemerintah, masyarakat serta seluruh *stakeholders*.

Penelitian ini tidaklah mungkin terlaksana tanpa disertai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kegiatan untuk menghimpun penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan guna menemukan acuan dalam melakukan penelitian terbaru. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga dapat dipergunakan sebagai penguat argumen penelitian dalam mengkaji berbagai masalah penelitian secara saksama, sekaligus menghindari tindakan plagiarisme bagi peneliti. Pada **Tabel 1.3** berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dihimpun oleh penulis dari sejumlah karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Tabel 1.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1. | Santana, P., dkk. (2008). <i>Crime: Impacts of Urban Design and Environment</i> . Prosiding <i>Rivista Internazionale di Cultura Urbanistica 05</i> . | 1. Menentukan distribusi kejahatan. 2. Mengetahui hubungan antara distribusi spasial antara kerentanan sosial ekonomi. 3. Mengetahui asosiasi spasial antara aspek desain perkotaan dan kejahatan. | 1. Kondisi lingkungan fisik. 2. Kerentanan sosial-ekonomi. 3. Hotspot kejahatan. | Penelitian kuantitatif dengan analisis eksploratif. Analisis data dilakukan menggunakan metode geostatistik yakni <i>Moran I global</i> dan <i>local spatial autocorrelation statistics</i> . | Wilayah yang paling rentan terhadap kejahatan terletak di Buraca, Mina, Venteira dan Damaia. Di wilayah ini, <i>hotspot</i> kejahatan berada cukup jauh dari pos polisi terdekat. Di wilayah ini diketahui memiliki ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup besar. Selain itu, desain lingkungan fisik dengan kejahatan hanya memberikan kontribusi minimum. |
| 2. | Drianda, R. P., Kinoshita, I., dan F. Deviana. (2015). <i>Perencanaan Lingkungan Perkotaan yang Aman dari Ancaman Kriminalitas terhadap Anak: Sebuah Studi</i> | Mengetahui berbagai intervensi lingkungan fisik dan sosial perkotaan oleh masyarakat Jepang untuk menanggulangi ancaman kriminalitas bagi anak-anak. | 1. Intervensi lingkungan fisik. 2. Intervensi lingkungan sosial. | Penelitian ini bergenis eksploratif dengan menggunakan data seri dari periode sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumentasi, studi literatur, kuesioner tertutup, <i>focus group discussion</i> , serta wawancara dengan para narasumber seperti orang tua murid, | 1. Intervensi tipe 1: peningkatan aksi komunitas untuk pencegahan potensi tindak kriminal (aktivitas patroli keamanan di lingkungan anak, pembentukan jaringan Kodomo 110, dan edukasi kepada anak mengenai cara menjaga keselamatan pribadi). 2. Intervensi tipe 2: penggunaan teknologi untuk pencegahan tindak kriminal (pemasangan CCTV, pemasangan alat |

Moh Dede, 2018

PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|--|---|
| 3. | <p>Kasus dari <i>Negeri Jepang</i>. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 26 (1).</p> <p>Salehi, E. (2010). <i>Environmental Factors and Urban Crime</i>. Prosiding the 22nd International Housing Research Conference.</p> | <p>Mengidentifikasi peranan faktor lingkungan dan merumuskan kriteria lingkungan untuk mengurangi kerentanan kejahatan di daerah perkotaan sesuai dengan instruksi <i>Iranian the Ministry of Housing and Urbanism</i>.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Kondisi lingkungan (fisik, sosial, ekonomi, dan budaya). Kejahatan di perkotaan (<i>urban crime</i>). | <p>kepala sekolah, komisi pendidikan kota, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah yang menangani masalah keamanan di lingkungan kota.</p> <p>Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil tersebut akan komparasi dengan teori pencegahan kejahatan berbasis <i>environmental features</i> dan kondisi kejahatan eksisting.</p> | <p>pelindung yang memiliki fungsi pelacak dan komunikasi, dan pendirian sarana emergensi di ruang publik).</p> <p>3. Intervensi tipe 3: desain dan manajemen ruang kota sesuai kaidah CPTED.</p> <p>Kualitas lingkungan dan kejahatan di kawasan perkotaan umumnya ditentukan oleh kesadaran lingkungan (kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kejahatan akan meningkatkan keamanan lingkungannya), visibilitas pemukiman, fitur geografis lainnya, keterjangkauan bantuan (tetangga maupun aparat keamanan), dan kualitas spasial (<i>landuse</i>, kepadatan penduduk, dan aksesibilitas).</p> |
| 4. | <p>Perkins, D., dkk. (1990). <i>Participation and the Social and Physical Environment of Residential</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui hubungan antara partisipasi masyarakat setempat dengan kejahatan. Mengetahui hubungan antara | <ol style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat Lingkungan fisik (lingkungan terbangun: <i>defensible</i> | <p>Pengumpulan data dilakukan secara survei melalui telepon, <i>block environmental inventory</i>, dan data kejahatan dari kepolisian. Berbagai variabel dianalisis</p> | <p>Pengaruh kondisi lingkungan fisik (tata letak dan desain pemukiman) dan lingkungan sosial (ketertangaan) yang sesuai akan memicu tingginya tingkat partisipasi maupun iklim sosial (<i>social climate</i>) yang pada akhirnya berperan dalam menanggulangi kejahatan di</p> |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|---|---|
| | <i>Blocks: Crime and Community Context. American Journal of Community Psychology</i> , 18. | kondisi lingkungan fisik dan sosial dengan kejahatan. | 3. Lingkungan sosial (karakteristik demografis dan <i>social climate</i>) 4. Kejahatan | menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi ganda. | lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini, hubungan antara iklim sosial dengan kejadian kejahatan masih belum terlihat jelas. |
| 5. | M. Dede, I. Setiawan, dan A. Mulyadi. (2017). <i>Application GIS to Analyse Crime Risk in Bandung</i> . Prosiding 2 nd International Conference in Sociology Education UPI 2017 | 1. Mengetahui berbagai faktor spasial yang mempengaruhi sebaran kejahatan di Kota Bandung. 2. Menyajikan sebaran kerawanan kejahatan dan <i>crime clock</i> di Kota Bandung. | 1. Faktor spasial-temporal kejahatan, terdiri atas <i>land use</i> , fasilitas publik, jaringan jalan, kepadatan penduduk, sebaran kemiskinan, <i>historical crime accident</i> , dan sebaran pos keamanan. 2. Kejahatan per wilayah. | Penentuan berbagai faktor spasial-temporal dilakukan berdasarkan studi literatur yang diverifikasi kembali menggunakan analisis statistika (korelasi). Penentuan kerawanan kejahatan dilakukan melalui analisis <i>overlay</i> menggunakan SIG dengan pembobotan dan pengharkatan secara matematis. | Di Kota Bandung, wilayah dengan kerawanan kejahatan sangat tinggi dan tinggi mencapai sekitar 65 persen. <i>Hotspot</i> kejahatan di Kota Bandung Bandung terkonsentrasi di wilayah barat dan pusat kota. Secara <i>crime clock</i> , pukul 18.00 s.d. 24.00 WIB merupakan waktu rawan kejahatan tertinggi di Kota Bandung. |

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018

Moh Dede, 2018
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN
KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu